

CCCC

by Muthiara Rafli

Submission date: 26-Dec-2022 10:10PM (UTC+1100)

Submission ID: 1481066155

File name: Jurnal_IKM_Mandiri_revisi_3.pdf (233.67K)

Word count: 7011

Character count: 48126

ABSTRAK

Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), pemerintah belum menerapkannya secara menyeluruh dan serentak di seluruh sekolah Indonesia. Satuan pendidikan diberikan keleluasaan mengimplementasikan kurikulum Merdeka sesuai dengan kesiapannya. Pada tahap kedua pelaksanaan Kurikulum Merdeka kemdikbudristek memberi kesempatan kepada sekolah yang bukan Sekolah Penggerak untuk menerapkan Kurikulum Merdeka secara mandiri. Dukungan utama yang diberikan pemerintah kepada sekolah yang menerapkan IKM jalur Mandiri adalah dengan menyediakan Platform Merdeka Mengajar dimana pendidik dan kepala sekolah dapat mempelajari Kurikulum Merdeka melalui Platform tersebut. Platform Merdeka Mengajar adalah sebuah terobosan baru di dunia pendidikan Indonesia, namun peluncuran platform ini tidak dibarengi dengan upaya pemerintah untuk memberikan edukasi kepada guru tentang pentingnya teacher agency dalam menghadapi kebijakan baru, mengingat Kurikulum Merdeka memberikan kuasa/ kendali kepada pendidik dan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum, sementara penyelenggaraan pendidikan Indonesia selama ini terpusat dengan menekankan pentingnya ketaatan (compliance) kepada arahan peraturan dan arahan dari pimpinan. Pemerintah mengharapkan pendidik berinisiatif dan berinovatif, sementara di sisi lain pendidik menunggu instruksi dan arahan dari pemerintah.

Kata Kunci: Implementasi Kurikulum Merdeka; Platform Merdeka Mengajar; Teacher Agency

ABSTRACT

In implementing the Merdeka Curriculum (IKM), the government has not implemented it thoroughly and simultaneously in all Indonesian schools. Education units are given freedom to implement the Merdeka curriculum according to its readiness. In the second stage of implementing the Merdeka Curriculum, the Ministry of Education, Culture and Research provides an opportunity for schools that are not Movement Schools to implement the Merdeka Curriculum independently. The main support provided by the government to schools that implement the IKM pathway Independent route is by providing the Merdeka Teaching Platform where educators and school principals can learn the Merdeka Curriculum through the Platform. The Merdeka Mengajar Platform is a new breakthrough in the world of Indonesian education, but the launch of this platform is not accompanied by government efforts to educate teachers about the importance of teacher eagerness in facing new policies, considering that the Merdeka Curriculum has been implemented independently. In facing new policies, considering that Merdeka Curriculum gives power/control to educators and education units in implementing the curriculum, while the implementation of Indonesian education has been centralized by emphasizing the importance of compliance with regulatory directives and directions from leaders. The government expects educators to take initiative and

be innovative, while on the other hand educators wait for instructions and directions from the government.

Keywords: Implementation of the Merdeka Curriculum; Merdeka mengajar Platform; Teacher Agency

PENDAHULUAN

Sebagai upaya dari pemulihan pembelajaran di Indonesia, pemerintah telah mengembangkan Kurikulum Merdeka yang fokus dan fleksibel serta diharapkan mampu mengembangkan karakter dan kompetensi peserta didik. Kemendikbudristek menjelaskan bahwa ada tiga karakter kurikulum merdeka, yang dapat mendukung pemulihan belajar, yaitu: (1) pembelajaran yang ditekankan kepada penguatan profil pelajar pancasila yang diharapkan dapat membangun *softskill* dan karakter peserta didik, (2) fokus pada materi yang esensial, pembuat kebijakan sudah sedemikian rupa memilih capaian pembelajaran yang paling esensial bagi peserta didik, (3) adanya pembelajaran terdiferensiasi yang menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik, serta penyesuaian kurikulum dengan konteks dan muatan lokal yang ada di satuan pendidikan.

Dalam implementasinya, pemerintah tidak menerapkan Kurikulum Merdeka secara serentak dan masif, dikarenakan Kemendikbudristek memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Dalam memberikan dukungan terhadap Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), pada tahun 2021 pemerintah membuat program Sekolah Penggerak (SP) dan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK-PK) sebagai sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka. Dalam program SP dan SMK-PK, pemerintah memberi dukungan berupa pendampingan implementasi selama tiga tahun dan pengalokasian dana khusus. Alokasi dana khusus tersebut diperoleh melalui BOS Kinerja, dimana menurut Permendikbudristek Nomor 2 tahun 2022 BOS Kinerja dialokasikan bagi sekolah dinilai berkinerja baik dan berprestasi berprestasi serta sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana program Sekolah Penggerak.

Pada tahun 2022 Kemendikbudristek memperluas Implementasi Kurikulum Merdeka, kepada sekolah yang bukan Sekolah Penggerak melalui jalur mandiri dengan mengeluarkan keputusan Kepala BSKAP tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka melalui Jalur Mandiri pada Tahun Ajaran 2022/2023 Tahap II. Untuk pemilihan jalur mandiri, Kemendikbudristek membebaskan satuan pendidikan untuk menentukan pilihan jalur mandiri yang akan dipilih dengan menggunakan angket. Angket pendataan berisi pertanyaan-pertanyaan terkait kesiapan satuan pendidikan untuk menerapkan Kurikulum Merdeka. Angket kesiapan memberikan pilihan yang paling sesuai terkait kesiapan satuan pendidikan.

Pilihan yang pertama adalah Mandiri Belajar, dimana satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk mengaplikasikan beberapa prinsip Kurikulum Merdeka dengan tidak

mengubah kurikulum yang diterapkan di satuan pendidikan. Pilihan kedua adalah Mandiri Berubah, di sini satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disiapkan pemerintah. Dan pilihan ketiga adalah Mandiri Berbagi, dimana satuan pendidikan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dengan mengembangkan perangkat ajarnya. (Kemendikbudristek, 2022b)

Dari pemaparan Kemendikbudristek tentang IKM jalur mandiri, yang terjadi saat ini bukan hanya perubahan kurikulum, melainkan juga perubahan strategi Kemendikbudristek dalam implementasi kurikulum. Untuk IKM jalur mandiri, satuan pendidikan dapat memilih jalur mandiri yang sesuai dengan kesiapan di satuan pendidikan masing-masing. Sumber informasi pelatihan berasal dari satu sumber yaitu dari Platform merdeka Mengajar, dimana guru berpartisipasi aktif dalam mengikuti pelatihan menggunakan teknologi. Selain itu satuan pendidikan bisa mendapatkan Bimbingan Teknis dari pemangku kepentingan di daerah dan penguatan ekosistem komunitas belajar, dan melakukan pelibatan masyarakat melalui mitra pembangunan.

Dukungan utama pemerintah terhadap sekolah yang memilih IKM jalur mandiri adalah dengan menyediakan Platform Merdeka Mengajar (PMM). Setidaknya ada enam strategi atau dukungan pemerintah yang bisa didapatkan melalui PMM ini, antara lain: pertama, pendidik dan kepala sekolah mempelajari PMM secara mandiri. Di platform ini pendidik dan kepala sekolah dapat mempelajari segala sesuatu yang terkait dengan Kurikulum Merdeka. Langkah yang bisa dilakukan adalah dengan mengakses fitur-fitur yang disediakan seperti asesmen murid, perangkat ajar, pelatihan mandiri, bukti karya, video inspirasi, komunitas dan LMS. Kedua, pendidik dan kepala sekolah mempelajari kurikulum merdeka dengan mengikuti seri webinar, dengan strategi ini diharapkan pendidik dan kepala sekolah dapat memperkuat pemahamannya mengenai Kurikulum Merdeka. Ketiga, pendidik dan kepala sekolah dapat bergabung dalam komunitas belajar untuk mempelajari dan berdiskusi mengenai Kurikulum Merdeka. Dengan memperdayakan dan memperkuat komunitas guru, diharapkan dapat membangun budaya saling berbagi sesama pendidik. Keempat, pendidik dan kepala sekolah melakukan praktik baik dengan menyebarkan informasi seputar kurikulum merdeka kepada pendidik-pendidik lain, supaya pendidik dapat memperoleh inspirasi tentang penerapan kurikulum merdeka di satuan pendidikan. Selain itu sekolah juga dapat melakukan pelatihan secara daring maupun luring dengan mengundang pembicara yang sudah direkomendasikan. Kelima, pendidik dan kepala sekolah juga dapat memanfaatkan Pusat Layanan Bantuan atau Helpdesk untuk menanyakan informasi yang ingin diketahui atau informasi yang lebih rinci mengenai Kurikulum Merdeka. Helpdesk ini bisa digunakan jika pendidik ingin menanyakan permasalahan secara langsung kepada admin PMM. Dan yang terakhir, pendidik dan kepala sekolah dapat melakukan kerjasama dengan mitra pembangunan. Mitra pembangunan dapat membantu memfasilitasi satuan pendidikan dalam belajar untuk menerapkan Kurikulum Merdeka.

Strategi implementasi dengan penggunaan platform secara daring ini dilakukan pemerintah sebagai upaya perbaikan sosialisasi kurikulum sebelumnya yang bertingkat, dimulai dari pelatihan Narasumber Nasional, Instruktur Nasional, Kepala Sekolah, Pengawas, serta Guru Sasaran yang mengakibatkan banyaknya informasi tidak tersampaikan dan menyimpang yang diterima oleh satuan pendidikan dan guru sasaran. Pemerintah menilai beberapa kelebihan jika sosialisasi diberikan melalui platform, diantaranya: pertama, seluruh guru di Indonesia bisa mendapatkan kesempatan mengakses pelatihan yang sama dengan kualitas yang sama. Kedua, setiap guru di Indonesia dapat saling berbagi praktik baik dan saling menginspirasi di platform yang sama. Ketiga, setiap guru di Indonesia dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan kecepatan masing-masing. Keempat, setiap guru di Indonesia dapat mengakses beragam perangkat ajar yang bisa dijadikan contoh, atau dapat langsung dipakai. Kelima, setiap guru di Indonesia dapat saling berjejaring antar wilayah, dan keenam seluruh guru di Indonesia dapat memiliki kesempatan untuk pembaharuan dokumen.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi Perubahan Kurikulum

Implementasi perubahan kurikulum yang merupakan bagian dari perubahan kebijakan pendidikan, merupakan proses yang panjang dan kompleks (Anggraena et al., 2021). Implementasi kurikulum merupakan langkah pertama dari rangkaian kegiatan aplikasi kurikulum, yang nantinya akan dilanjutkan dengan kegiatan modifikasi, monitoring dan evaluasi kurikulum (Print, 2020). Print mengatakan bahwa di awal, implementasi kurikulum akan mengalami beberapa kendala. Kendala biasanya terletak pada kurang sistematisnya prosedur implementasi kurikulum, sehingga tujuan dari para pengembang kurikulum, tidak sampai kepada implementator kurikulum yaitu para pendidik.

Untuk itu perancang kebijakan, dalam hal ini perancang kurikulum, perlu memperhatikan kompleksitas yang mengiringi perubahan kurikulum. Keberhasilan implementasi kurikulum, bukan hanya dipengaruhi oleh rancangan kurikulum, melainkan juga oleh bagaimana pihak pengelola mengatur strategi dalam mendukung satuan pendidikan dan pendidik dalam mengimplementasikan kurikulum. Pengelolaan perubahan sangat perlu diperhatikan karena, seyogyanya setiap perubahan kurikulum akan menuntut perubahan dari satuan pendidikan.

Kompleksitas implementasi kurikulum di tingkat daerah, yaitu satuan pendidikan, dan di kelas seringkali diabaikan oleh pembuat kebijakan sehingga tidak menghasilkan perubahan yang nyata di ruang kelas. Spillane (2005) menganalogikan proses sosialisasi kurikulum, dari pemerintah pusat hingga sampai kepada satuan pendidikan dan pendidik adalah seperti permainan "pesan berantai", semakin banyak pemain yang terlibat, semakin besar peluang terjadinya penyimpangan atau deviasi pesan yang diterima pemain terakhir. Dalam implementasi kurikulum, proses sosialisasi kurikulum lebih kompleks dari sekedar pesan berantai, karena satuan pendidikan dan pendidik, sebagai

pemain terakhir, bisa saja menerima informasi yang berbeda-beda dari pemain sebelumnya, dalam hal ini pengawas, pemerintah daerah, bahkan pemerintah pusat.

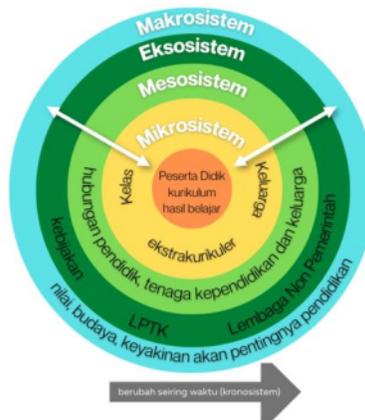
Dalam kajiannya tentang respon sekolah-sekolah di Amerika dalam menghadapi perubahan kurikulum, Bryk dan kawan-kawan menyebutkan bahwa reaksi dan respon yang berbeda akan selalu muncul dalam menghadapi perubahan kebijakan (kurikulum) (Bryk et al., 2015). Hal ini muncul karena adanya interaksi antara kebijakan pemerintah yang notabene merupakan kebijakan eksternal yang berasal dari luar satuan pendidikan dengan kebijakan internal terutama kebiasaan dan adat yang berlaku di sekolah. Penyesuaian diri bukanlah hal yang mudah, sehingga sering memunculkan permasalahan baru di satuan pendidikan. Pada hakikatnya proses seperti itu adalah wajar karena merupakan bagian dari proses pembelajaran (Wilcox et al., 2017). Hal ini tidak lantas membuat pemerintah, melepaskan satuan pendidikan dan membiarkannya menghadapi proses pembelajarannya itu sendiri. tetapi, pemerintah tetap harus memberikan dukungan kepada satuan pendidikan agar menghasilkan luaran yang maksimal dan dapat berdampak baik terhadap kualitas pembelajaran, dan yang paling penting adalah objektif yang diharapkan dari perubahan kurikulum, dapat tercapai.

Stephen Ball dan kawan-kawan (2012) mengatakan bahwa kegagalan dalam implementasi kurikulum, seringkali diatasi dengan membuat aturan baru tapi tidak mengubah strategi pengimplementasiannya. Pembuat kebijakan berasumsi bahwa kebijakan kurikulum baru yang dibuat, sangat kuat pengaruhnya, sehingga akan dapat mengubah perilaku dan cara pandang pendidik, sehingga satuan pendidikan dan pendidik akan menerapkan kebijakan baru tersebut dengan baik, tanpa memedulikan bagaimana kebijakan tersebut disosialisasikan dan dikelola di satuan pendidikan. Sementara itu Taylor (1997 dalam Ball et al., 2012) mengatakan bahwa langkah terukur yang bisa dikendalikan pemerintah adalah membuat kebijakan, sementara hal-hal yang terjadi di lapangan bukan dalam kendali mereka. Wilcox dan kawan-kawan (2017) mengatakan ini sebagai "*the more things change, the more they remain the same*" dengan kata lain semakin banyak perubahan yang terjadi, semakin banyak hal yang tidak berubah. Dokumen kurikulum selalu saja berubah, namun implementasinya dari tahun ke tahun tetap menjadi masalah yang belum menemukan solusinya

B. Pendekatan Sistem Ekologi

Dari tinjauan berbagai sumber mengenai model pengembangan kurikulum, implementasi kurikulum seringkali dianggap sebagai proses yang linear (satu arah), baik *bottom-up* maupun *top-down*. *Bottom up* dimana perubahan berasal dari akar rumput yang berujung pada perubahan kebijakan, sedangkan *top-down* merupakan arahan atau instruksi yang berasal dari pusat kemudian diturunkan kepada kepala daerah, satuan pendidikan dan akhirnya kepada pendidik. Beberapa pakar seperti (S. Ball et al., 2012; Bjork, 2016; Bryk et al., 2015; Viennet & Pont, 2017) mempunyai pandangan lain, menurut mereka implementasi kebijakan merupakan hubungan yang kompleks antara kebijakan yang dikeluarkan pusat, dengan respon yang muncul dari bawah (satuan pendidikan), serta perubahan yang terjadi akibat reaksi dari keluarga, masyarakat, dan disuarakan oleh

media. Dengan demikian implementasi perubahan kurikulum merupakan proses yang tidak statis, tidak linear, dan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan berbagai pihak.



Gambar 1 Pendekatan Sistem Ekologi Untuk Implementasi Kurikulum (OECD, 2019)

Model sistem ekologi (Bronfenbrenner, 1979) yang mengilustrasikan bagaimana keterkaitan lingkungan dan pengaruhnya terhadap perkembangan anak, diadaptasi oleh (OECD, 2019), dimana OECD mengembangkan sistem ekologi di dunia pendidikan, untuk melihat bagaimana pengaruh pihak-pihak terkait dalam keberhasilan implementasi perubahan kurikulum, dan melihat hubungan berbagai pemangku kepentingan di level yang berbeda. Model sistem ekologi mengenai implementasi kurikulum tergambar dalam Gambar 1. Terlihat bahwa peserta didik adalah pusat dari implementasi kurikulum, segala upaya yang dilakukan terkait implementasi kurikulum, bertujuan untuk perbaikan karakter dan pengembangan keterampilan peserta didik. Prinsip yang berpusat kepada peserta didik ini, digunakan dalam merancang desain, maupun implementasi kurikulum (*learner-centered curriculum*).

Aspek pertama yang berpengaruh adalah mikrosistem, dimana mikrosistem adalah hal yang berinteraksi langsung dengan peserta didik. Yang termasuk ke dalam lingkungan mikrosistem adalah kelas (guru, kegiatan pembelajaran, dan teman sebaya), kegiatan ekstrakurikuler dan juga lingkungan keluarga. Selanjutnya adalah mesosistem, yang merupakan interaksi antara unsur-unsur di sekolah seperti pendidik, tenaga pendidikan dan keluarga. Komunikasi, budaya kerja yang saling terbuka, saling percaya, antar berbagai elemen adalah hal yang krusial dalam pengimplementasian kurikulum (Bryk et al., 2015; OECD, 2019; Wilcox et al., 2017). Sikap saling percaya dan terbuka antara orangtua dan peserta didik juga berdampak positif terhadap implementasi kurikulum di satuan pendidikan.

Aspek selanjutnya adalah eksosistem, yang terdiri dari pemda, pemerintah pusat, yang mengeluarkan aturan-aturan pendidikan yang berpengaruh langsung terhadap implementasi kurikulum. Kebijakan yang dikeluarkan perlu diselaraskan dengan implementasi kurikulum. Contohnya adalah kebijakan tentang jumlah jam mengajar guru

yang bisa berubah karena perubahan struktur kurikulum, jangan sampai merugikan guru dalam penerimaan tunjangan sertifikasi, atau harus membuat guru mencari jam mengajar di sekolah lain untuk pemenuhan jam mengajarnya. Contoh lain adalah penggunaan dana bantuan BOS yang perlu diselaraskan dengan kegiatan di sekolah seperti pembelajaran intrakurikuler dan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Peranan organisasi non pemerintah, DUDI, dan universitas juga sangat mempengaruhi implementasi kurikulum di tingkat satuan pendidikan.

Aspek terluar yang mempengaruhi implementasi kurikulum adalah makrosistem, dimana ideologi, nilai, adat dan budaya yang ada di masyarakat berpengaruh terhadap sistem pendidikan, proses pendidikan dan lingkungan. Bjork (2016) dalam studinya di Jepang menemukan bahwa kebijakan menyederhanakan muatan dan konten pembelajaran, melalui pembelajaran terpadu misalnya, yang ditujukan bagi penguatan kompetensi dan kesejahteraan peserta didik tidak sejalan dengan pandangan orangtua dan pendidik. Pengurangan beban belajar diharapkan dapat mengurangi kelelahan fisik maupun mental peserta didik di Jepang. Sementara menurut pendidik dan orang tua, yang paling penting dalam pendidikan menengah (SMA), ialah kompetensi mumpuni peserta didik yang dapat digunakan untuk mengikuti tes masuk perguruan tinggi yang diminati. Untuk itu, kebijakan mengurangi beban belajar peserta didik tersebut justru dianggap kurang produktif. Ketidakselarasan antara kebijakan kurikulum dengan paradigma merupakan tantangan sistem makro dalam perubahan kurikulum.

Hal lain yang juga berpengaruh terhadap implementasi kurikulum adalah kronosistem yang merupakan aspek yang berkaitan dengan waktu. Dalam melakukan perubahan kurikulum, pendidik membutuhkan waktu untuk memahami, memproses dan mengimplementasikan perubahan kurikulum yang terjadi. Pendidik akan merasa frustrasi dan menolak perubahan jika tidak diberikan waktu yang cukup untuk melakukan perubahan tersebut (Cheung & Wong, 2016; Wilcox et al., 2017). Selain itu kronosistem juga terkait dengan sejarah perubahan kurikulum yang terjadi dari waktu ke waktu.

Dalam implementasi kurikulum, model sistem ekologi dapat digunakan dalam mengidentifikasi permasalahan dalam implementasi serta menentukan strategi yang lebih tepat dan menyeluruh. Spillane (2005) menyampaikan bahwa dengan menggunakan sudut pandang sistem ekologi, perancang kurikulum hendaknya bisa mengidentifikasi hal yang berpengaruh terhadap pengetahuan, pemaknaan, serta keputusan pendidik dan juga kepala sekolah dalam menanggapi kebijakan baru yang harus mereka terapkan. Ini disebut dengan proses *sense-making* (pemaknaan kebijakan).

C. Memaknai Kurikulum di Akar Rumpun

Pendidik dalam hal ini guru adalah kunci utama keberhasilan implementasi kurikulum (Rusman, 2019). Pendidik merencanakan, melaksanakan, menilai dan mengembangkan pembelajaran dengan peserta didik sebagai pusatnya, mereka akan melakukan proses pemaknaan terhadap kebijakan, serta dokumen kurikulum lainnya yang dikeluarkan oleh

pemerintah (Ball, 2005). Kompleksitas dari implelementasi kurikulum mulai terjadi semenjak pelaku kebijakan di akar rumput seperti pendidik, kepala sekolah dan pemda memaknai sebuah kebijakan (*sense making*) kemudian menginterpretasikannya sesuai dengan pemahamannya (Spillane et al., 2002).

Spillane dan kawan-kawan (2002) mengatakan bahwa terdapat tiga proses pemaknaan kebijakan di akar rumput, yaitu: (1) *individu cognition*, yaitu interpretasi yang dilakukan setiap individu, baik pendidik maupun kepala sekolah ketika individu tersebut mempelajari kebijakan dengan dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, keyakinan terhadap pendidikan, nilai yang dianut, makna pembelajaran dan perannya sebagai pendidik; (2) *situated condition*, yaitu interpretasi yang dilakukan individu karena pengaruh situasi sekitar, sesuai konteks tempatnya bekerja; (3) Peran pembuat kebijakan pusat yang membantu individu menginterpretasikan kebijakan tersebut melalui pelatihan dan pendampingan dalam rangka implementasi kebijakan.

Proses pemaknaan kebijakan oleh pendidik tersebut setidaknya memberitahu kita tentang hal berikut: pertama, pendidik merupakan pihak yang mempunyai kendali dalam pengimplementasian kurikulum (*teacher agency*). Dengan kendali yang dimiliki tersebut, pendidik dapat secara aktif menginterpretasikan kemudian membuat keputusan bagaimana mereka akan merespon kebijakan yang sudah mereka terima. Pendidik mempunyai kendali apakah mereka akan melaksanakan persis seperti yang tertuang dalam kebijakan pemerintah, atau memodifikasinya sesuai keadaan yang dihadapi di kelas nyata, atau tidak peduli dengan kebijakan baru dan tetap menggunakan kebijakan yang lama (Kneen et al., 2021; Spillane, 2005; Wilcox et al., 2017). Kedua, Proses pemaknaan/penginterpretasian kebijakan memang dilaksanakan di tingkat satuan pendidikan oleh pendidik, namun proses ini tidak hanya melibatkan elemen yang ada di satuan pendidikan (mesosistem), tetapi juga memerlukan dukungan dari pemerintah dan mitra lain (eksosistem) yang dapat memfasilitasi pendidik mempelajari kebijakan baru tersebut. Pada sisi lain, hambatan dan tantangan dalam implementasi kurikulum juga merupakan pengaruh dari aspek eksosistem dan makrosistem. Pandangan skeptis masyarakat terhadap adanya perubahan kurikulum, juga berpengaruh terhadap proses pemaknaan. Terkadang pendidik dan kepala sekolah terpengaruh dan mengikuti pandangan tersebut, karena ada kekhawatiran jika mereka kehilangan kepercayaan publik jika tetap mengikuti arahan pengampu kebijakan dalam mengimplementasi perubahan kurikulum (S. Ball et al., 2012).

Kuasa yang dimiliki seorang pendidik (*teacher agency*) menunjukkan bahwa mereka adalah birokrat yang bekerja di akar rumput (*street-level bureaucrats*) (Lipsky, 1980). Sebagai pemegang birokrasi di akar rumput, pendidik memiliki kuasa untuk menilai perolehan Capaian Pembelajaran (CP) dari suatu pembelajaran. Apakah CP dapat mengembangkan kompetensi siswa secara efektif seperti yang diharapkan. Pendidik juga yang menilai apakah cita-cita dari kegiatan Proyek Penguatan Profil Pembelajaran Pancasila (P5) tercapai dengan baik. Dimana cita-cita dari program P5 itu sendiri adalah untuk mencapai profil Pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat yang

kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila (Kemendikbudristek, 2021). Kebijakan atau keputusan yang dibuat pendidik dan satuan pendidikan, setelah melakukan serangkaian pemaknaan dan perencanaan itulah yang menjadi kebijakan nyata atau kebijakan sebenarnya (Ball, 2005) sebagai kebijakan yang sebenarnya. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh birokrat akar rumput tidak selalu selaras dengan kebijakan dari pusat, hal ini tidak lantas disimpulkan sebagai penentangan kepada arahan pusat. Ketidaksielarasan, bisa muncul karena situasi di lapangan yang kompleks, sehingga tidak dimungkinkan untuk mengikuti arahan pemerintah pusat. Menurut Lipsky (1980) dan Spillane (2004), profesi fungsional seperti, pendidik, tenaga kesehatan, pekerja sosial, polisi, dan pekerjaan lain yang berhubungan langsung dengan khalayak adalah profesi yang paling sering tidak memenuhi ekspektasi pemerintah pusat, terutama dalam hal implementasi kebijakan karena situasi lapangan yang kompleks. Mereka harus banyak berimprovisasi dalam menghadapi situasi di lapangan, sementara kebijakan yang dibuat untuk mereka, dirancang dengan berasumsi bahwa kerjaan mereka monoton dan stabil. Seringkali keputusan yang diambil oleh birokrat akar rumput berbeda dengan kebijakan yang pusat, karena situasi di lapangan sulit untuk mengaplikasikan kebijakan tersebut, sehingga mereka hanya mengimplementasikan kebijakan yang tampak saja (Spillane et al., 2002).

Pada awalnya pendidik dan satuan pendidikan diharapkan dapat mengimplementasikan kebijakan dengan mengikuti arahan baik teknis dan non teknis sepenuhnya, namun berkaca kepada besarnya kekuasaan yang dimiliki para birokrat akar rumput dan kompleksnya tantangan implementasi kurikulum berbagai negara dari waktu ke waktu, pendekatan itu semakin ditinggalkan oleh banyak negara, tren strategi kebijakan implementasi kurikulum saat ini tidak lagi menggunakan strategi implementasi taat (*implementation fidelity*), namun lebih kepada implementasi dengan integritas (*implementation integrity*) (OECD, 2019). Dari hasil berbagai penelitian yang terlihat bahwa pendekatan *top-down* dalam implementasi kurikulum sudah tidak relevan dengan keadaan saat ini, maka pemerintah memberikan kebebasan kepada pendidik dan satuan pendidikan untuk menyesuaikan kebijakan dari pusat dengan konteks di satuan pendidikan masing-masing namun tetap sejalan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dan tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah adalah kemerdekaan yang bertanggungjawab, artinya, satuan pendidikan bebas mengadaptasi kebijakan pemerintah, namun bertanggungjawab agar prinsip dan tujuan tetap sesuai dengan kebijakan.

D. Budaya Sistem Pendidikan Indonesia

Sebelumnya telah dibahas tentang kompleksitas implementasi perubahan kurikulum dari segi psikologi sosial, dimana kuasa guru (*teacher agency*) dan proses pemaknaan (*sense making*) menjadi faktor penting dalam implementasi kurikulum. Hal yang menjadi tantangan implementasi kurikulum adalah aspek seperti yang disebutkan sebelumnya dalam model sistem ekologi, yaitu budaya (makrosistem) dan sejarah (kronosistem). Hal ini senada dengan yang disampaikan Benavot & Resh (2003) bahwa salah satu

tantangan implementasi juga dapat disebabkan oleh makrosistem yaitu budaya dan nilai yang dianut masyarakat. Terkadang masyarakat memiliki pendapat dan standar tersendiri, mengenai bagaimana pengelolaan pendidikan seharusnya dikelola

Bjork (2005) meneliti tentang seberapa besar pengaruh makrosistem Indonesia terhadap implementasi kurikulum yang berlaku di Indonesia, dan bagaimana penerapan muatan lokal di satuan pendidikan (SMP di pulau Jawa). Bjork mengaji tentang bagaimana respon daerah dan satuan pendidikan. Sistem desentralisasi pendidikan yang dianut di Indonesia telah memberikan kesempatan kepada pendidik dan satuan pendidikan dapat berperan lebih dalam pengembangan kurikulum. Pemda diminta untuk melibatkan pendidik dan juga masyarakat sekitar dalam menyusun kurikulum untuk pembelajaran kontekstual yang relevan dengan lingkungan sekitar. Namun kebijakan pelibatan tersebut kurang mendapat tanggapan yang baik dari pengambil kebijakan di akar rumput, daerah tidak siap dengan perubahan yang ditawarkan pemerintah tersebut. Ketidaksiapan tersebut berupa ketidaksiapan dengan konten kurikulum muatan lokal (mulok) itu sendiri, maupun dari ketidaktersediaan pengajar yang menguasai konten muatan lokal tersebut. Banyak satuan pendidikan yang mencari langkah praktis dengan menjadikan mulok sebagai pelajaran prakarya ataupun seni yang sebenarnya jauh dari kesan muatan lokal. Selain itu, terdapat juga satuan pendidikan yang tidak membuka mata pelajaran mulok karena kekurangan tenaga pendidik yang menguasainya.

Dengan menggunakan sudut pandang budaya, politik dan sejarah perkembangan sistem pendidikan di Indonesia, Bjork (2005) menemukan masalah ketidakselarasan antara budaya politik dalam sistem pendidikan Indonesia, dengan sistem desentralisasi yang menjadi kebijakan pemerintah pusat saat itu. Selama ini, tidak pernah dibangun budaya partisipatif dalam perencanaan kebijakan di tingkat lokal, sistem pendidikan tertutup dimana pendidik hanya mengikuti arahan pemerintah pusat. Ketika sistem desentralisasi mulai diterapkan di awal tahun 2000-an, daerah merasa canggung karena diberikan sesuatu yang baru dan asing dengan budaya institusi pendidikan yang selama ini dipegang. Pemerintah tidak memberikan pemahaman yang baik kepada pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan pendidik untuk memegang kendali dalam kurikulum. Kesiapan tersebut bukan sekedar tentang kemampuan kognitif saja, tetapi juga kesiapan secara budaya. Walaupun perubahan itu sudah terjadi puluhan tahun, namun hingga saat ini belum ada perubahan cara pandang pemerintah daerah tentang desentralisasi, kecuali hanya dalam tataran administrasi saja.

Bjork juga meneliti fenomena bahwa pendidik sekalipun tidak berharap mereka memiliki kuasa atau kendali dalam menentukan kurikulum. pendidik tidak antusias untuk aktif berpartisipasi dalam menentukan pembelajaran di kelasnya sendiri. Terlepas dari apakah sebenarnya seorang pendidik memiliki kemampuan kontrol atau tidak, namun sudah tertanam dalam pikiran bahwa seorang pendidik tidak memerlukan inisiatif dalam berinovasi, sebagai pegawai, mereka siap untuk melakukan transmisi (memindahkan) pengetahuan dan nilai, bukan transform (mengubah) apa yang biasa mereka lakukan.

Almond dan Verba (1989) menyebutkan bahwa keselarasan (*congruency*) antara budaya politik dengan kebijakan haruslah tercipta. Kebijakan yang tidak selaras dengan budaya politik makro, tidak akan dapat bertahan lama dalam tahap implementasinya, kebijakan hanya akan diimplementasi dalam waktu yang singkat, dan kemudian kembali lagi kepada tradisi lama (Steiner-Khamsi, 2014).

Menurut Bjork, sistem sentralisasi yang selama ini berlaku di sistem pendidikan Indonesia, yang menekankan pentingnya ketaatan (*compliance*) pada pimpinan dan aturan dari pusat, membuat ekspektasi pemerintah tidak terwujud, konsep otoritas lokal untuk mengembangkan kurikulum masih asing dan tidak familiar bagi pendidik dan tenaga kependidikan di tingkat lokal

Temuan Bjork ini merupakan tantangan dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka yang mengutamakan kebebasan satuan pendidikan dan guru untuk dapat secara mandiri dan aktif mengembangkan dan mengelola kurikulum di satuan pendidikannya. Walaupun penelitian tersebut dilakukan belasan tahun yang lalu, namun strategi implementasi Kurikulum Merdeka tetap harus memperhatikan aspek budaya makro ini, karena budaya berubah relatif lambat.

Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka

Pemaknaan kebijakan dari pusat dan proses pengambilan keputusan atau kebijakan yang diimplementasikan di satuan pendidikan tetap akan dilakukan terlepas adanya arahan pemerintah pusat atau tidak (Ball, 2005). Dengan artian, ada atau tidaknya dukungan pemerintah, proses adaptasi kebijakan di satuan pendidikan khususnya di kelas akan tetap dilakukan (Ball et al., 2012; Lipsky, 1980; Spillane, 2004). Oleh sebab itu, agar proses sesuai dengan tujuan kurikulum yang baru, maka pemerintah perlu menyusun strategi pengimplementasian kurikulum dengan melihat kompleksitas implementasi di tingkat daerah, di satuan pendidikan, dan juga di pembelajaran yang sempat terkendala oleh pandemi COVID-19. Dalam merancang strategi implementasi Kurikulum Merdeka perlu diperhatikan strategi implementasi yang sudah pernah diterapkan baik di Indonesia maupun di negara lain.

Dalam menentukan Strategi implementasi Kurikulum Merdeka, perlu juga memperhatikan prinsip-prinsip perancangan kurikulum, yaitu: (1) sederhana, mudah untuk dipahami dan dilaksanakan; (2) difokuskan pada kompetensi dan karakter peserta didik; (3) fleksibel, mudah untuk diadaptasikan; (4) selaras, sejalan dengan perkembangan zaman; (5) bergotong royong, megandalkan kolaborasi; dan (6) memperhatikan hasil analisis dan *feedback*. Ada tiga hal penting yang hendaknya betul-betul disadari oleh pendidik dan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, yaitu: (1) Menerapkan Kurikulum Merdeka merupakan pilihan, satuan pendidikan dapat leluasa memutuskan apakah akan menerapkannya sebagai salah satu usaha dalam mengatasi *loss learning* atau tidak. (2) Implementasi kurikulum merupakan proses pembelajaran bagi pendidik dan satuan pendidikan sesuai dengan

tahapan kesiapan mereka dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Hal ini mengakibatkan penerapan kurikulum antar satu satuan pendidikan tidaklah sama dengan satuan pendidikan yang lain. Ketiga, menurut teori Bronfenbrenner (OECD, 2019) support terhadap implementasi kurikulum haruslah dilaksanakan secara menyeluruh, intervensi hendaknya dilakukan kepada faktor yang mendukung implementasi secara langsung atau tidak.

Beberapa strategi yang dilakukan pemerintah sebagai tindak lanjut dari IKM jalur mandiri adalah: (1) membantu satuan pendidikan mengukur kesiapannya dalam memilih jalur Implementasi Kurikulum Merdeka, (2) memfasilitasi satuan pendidikan dengan kontenperangkat ajar dan penilaian dalam format digital, (3) Memberikan pelatihan mandiri secara daring (4) merekomendasikan narasumber Kurikulum Merdeka dari SP/SMK-PK yang sudah melaksanakan IKM, dan (5) memfasilitasi pengembangan Komunitas Belajar.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana proses pengambilan data dilakukan melalui penyebaran angket kepada 29 responden yang merupakan pendidik yang mengajar di kelas X di SMA di Kabupaten Siak Propinsi Riau yang menerapkan IKM jalur Mandiri Berubah. Menurut Creswell Creswell dan kawan-kawan (2007) Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dapat menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi secara faktual. Objek penelitian ini berupa dokumen atau data yang berkaitan dengan IKM jalur Mandiri Berubah khususnya mengenai data kesiapan pendidik mengimplementasikan Kurikulum Merdeka di pembelajaran di kelas. Pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode deskriptif analisis yang tidak hanya menguraikan hasil temuan melainkan memberikan penjelasan dan pemahaman terkait objek penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan data empiris terkait IKM jalur Mandiri Berubah di SMA di Kabupaten Siak, kemudian dibandingkan dengan literatur yang relevan dengan penelitian.

PEMBAHASAN

A. Satuan Pendidikan dalam Memaknai IKM Mandiri

Dengan dikeluarkannya keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka Melalui Jalur Mandiri pada Tahun Ajaran 2022/2023 Tahap II. Maka satuan pendidikan yang bukan merupakan Sekolah Penggerak diberikan keleluasaan untuk menentukan pilihan jalur mandiri yang akan dipilih sesuai kesiapannya, dengan mengisi angket yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Terdapat sejumlah indikator yang dapat menggambarkan kesiapan satuan pendidikan untuk menerapkan Kurikulum Merdeka. Dengan mengisi angket kesiapan, maka satuan pendidikan dapat melihat tingkat kesiapan sekolah dan memilih

jalur implementasi kurikulum merdeka yang paling tepat dengan kondisi satuan pendidikan, sehingga diharapkan pelaksanaan kurikulum merdeka akan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Jika satuan pendidikan merasa belum cukup siap untuk menerapkan kurikulum merdeka, maka satuan pendidikan tersebut dapat menerapkan kurikulum merdeka pada tahun ajaran berikutnya. Dengan fleksibilitas yang diberikan, diharapkan satuan pendidikan dapat mempersiapkan diri untuk melakukan perubahan yang besar dalam implementasi kurikulum. Adalah penting bagi satuan pendidikan untuk mendapatkan waktu yang cukup dalam mempersiapkan diri untuk mengimplementasikan kurikulum (Tikkanen et al., 2017). Satuan pendidikan dapat melakukan observasi terlebih dahulu mengenai kurikulum baru, sebelum mengimplementasikannya sendiri.

Dalam pelaksanaannya sebagian satuan pendidikan mengisi angket sesuai dengan kenyataan yang ada di satuan pendidikan, namun tidak sedikit satuan pendidikan yang mengisi angket dengan melakukan manipulasi data dengan harapan agar satuan pendidikan tersebut dapat direkomendasikan untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka dengan jalur Mandiri Berubah ataupun jalur Mandiri Berbagi. Di satu sisi, *stakeholder* di satuan pendidikan belum siap mengimplementasikan perubahan kurikulum, namun di sisi lain satuan pendidikan juga tidak ingin ketinggalan dalam melaksanakan kebijakan terbaru pemerintah, satuan pendidikan memilih untuk melakukan perubahan secara perlahan-lahan dimulai dari sekarang dengan mempelajari perubahan kurikulum sambil mempraktekkannya di lapangan, daripada nanti di tahun 2024 mempelajari Kurikulum Merdeka dalam tempo yang singkat. Sulit bagi sebuah satuan pendidikan untuk mempelajari/ mengobservasi sebuah kurikulum, jika kurikulum tersebut tidak dipakai di satuan pendidikan tersebut. Hal ini dikarenakan, satuan pendidikan disibukkan oleh kegiatan pengimplementasian kurikulum yang berlaku, sehingga belajar mengenai kurikulum lain tidak menjadi prioritas.

Implementasi Kurikulum Merdeka bagi sekolah yang memilih jalur mandiri berubah, sudah dilaksanakan sejak semester ganjil tahun ajaran 2022/2023. Sesuai arahan Kemendikbudristek, sekolah yang belum siap dari segi administrasi, bisa menggunakan perangkat ajar yang sudah disiapkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Perangkat ajar yang saat ini sudah disiapkan pemerintah di Platform Merdeka Mengajar adalah modul ajar atau RPP+ dan buku teks yang diperuntukkan bagi guru dan murid. Guru bebas menggunakan modul ajar dan buku teks yang sesuai dengan karakteristik peserta didik yang dihadapi, guru juga dapat memodifikasi modul ajar tersebut agar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Berdasarkan

Satuan Pendidikan yang memilih IKM jalur Mandiri Berubah diwajibkan untuk mengikuti pelatihan mandiri tentang Implementasi Kurikulum Merdeka yang disediakan pemerintah di Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang bisa di akses melalui akun belajar.id yang dimiliki oleh masing-masing pendidik. Pelatihan Mandiri tersebut disajikan dalam bentuk seri pelatihan dan webinar yang berisi topik-topik dengan modul-modul yang sudah disiapkan. Dalam setiap modul guru belajar melalui paparan video dan menjawab soal asesmen terkait dengan materi video yang disampaikan. di setiap akhir topik, guru

diminta melakukan refleksi dan melakukan praktik aksi nyata. Praktik aksi nyata adalah aksi mengomunikasikan pemahaman pendidik terkait topik yang dibahas kepada audiens atau pendidik-pendidik lain secara daring maupun luring. Dari kegiatan tersebut pendidik diharapkan bisa memahami kurikulum merdeka, memaknainya dan mengimplementasikannya dalam pembelajaran.

Dalam paparan kemendikbudristek mengenai enam dukungan pemerintah dalam implementasi kurikulum, bahwa selain perubahan kurikulum kemendikbudristek juga mengubah strategi pelatihan sosialisasi Kurikulum Merdeka (Kemendikbudristek, 2022a). Pelatihan dilakukan dengan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan, dalam hal ini pendidik dan kepala sekolah untuk mengikuti pelatihan mandiri melalui Platform Merdeka Mengajar. Guru secara partisipatif menggunakan teknologi, serta terlibat dalam komunitas belajar, agar dapat memahami Kurikulum Merdeka dengan baik. Arahan penggunaan strategi ini diperkuat dengan adanya surat edaran dari Dirjen GTK yang ditujukan kepada Kadisdikprov, Kadisdik Kabupaten/Kota, Kepala Sekolah dan pendidik agar kepala sekolah dan guru berpartisipasi aktif untuk mempelajari Kurikulum Merdeka dengan memanfaatkan semua fitur yang ada di Platform Merdeka Mengajar.

Dalam praktek Implementasi Kurikulum Merdeka jalur Mandiri Berubah di lapangan, Platform Merdeka Mengajar tidak serta merta dapat melunaskan kewajiban pemerintah dalam memberikan dukungan kepada satuan pendidikan. Dari 29 responden yang menjadi partisipan, ketika dimintai pandangan mereka mengenai sosialisasi kurikulum merdeka, 25 diantaranya meminta agar sosialisasi kurikulum secara tatap muka lebih sering diadakan, agar proses pemaknaan kurikulum dapat berjalan dengan baik, empat responden lain memberikan tanggapan yang berbeda, satu diantaranya lebih menyoroti kepada video yang terlalu banyak, kemudian satu orang lagi yang menyoroti waktu pelatihan yang tidak tepat dan dua orang lain mengatakan bahwa sosialisasi dengan menggunakan PMM sudah baik. Dari data yang diperoleh terlihat bahwa pendidik masih mengharapkan pelatihan yang dilakukan secara luring (*on site*), beberapa alasan yang dikemukakan pendidik mengapa lebih memilih pelatihan luring dibandingkan dengan pelatihan daring adalah, pendidik kesulitan meluangkan waktu khusus untuk mengikuti pelatihan di Platform Merdeka Mengajar.

Pemerintah memang memberikan keleluasaan buat pendidik untuk mengikuti pelatihan mandiri kapan dan dimanapun, namun meluangkan waktu khusus untuk mengikuti pelatihan di luar jam sekolah bukanlah hal mudah bagi pendidik, sehingga banyak pendidik yang mengikuti pelatihan sembari mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan rutinitas yang lain. Selain itu ada juga pendidik yang mengikuti pelatihan, tanpa menyimak video, kemudian ia menjawab asesmen dengan mengikuti jawaban yang sudah beredar di internet. Bagaimana pemaknaan (*sense making*) kurikulum akan berjalan dengan baik, sementara sosialisasinya saja tidak bermakna untuk pendidik. Berbeda halnya jika pelatihan dilakukan secara luring, mau tidak mau pendidik akan berada pada tempat dan waktu yang khusus sehingga lebih fokus untuk mengikuti pelatihan.

Alasan lain yang dikemukakan adalah materi pelatihan di PMM bersifat teoritis dan sangat umum. Pendidik kesulitan menghubungkan teori yang diberikan dengan konteks yang mereka hadapi di lapangan, terutama bagaimana mengaitkannya dengan pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran yang mereka ampu. Apalagi banyak konsep-konsep baru yang diperkenalkan, yang tentu saja membutuhkan bimbingan dari pihak yang berkompeten agar penafsiran pendidik tentang konsep baru tersebut tidak keliru. Konsep pembelajaran terdiferensiasi misalnya, konsep ini benar-benar baru bagi pendidik. Pembelajaran berdiferensiasi mengakomodir peserta didik berdasarkan kebutuhannya. Memberikan perlakuan yang berbeda kepada peserta didik dalam satu kelas dari segi konten, proses dan produk sudah nampak pelik jika hanya dipelajari dengan membaca modul atau memahami dari video saja. Terlebih contoh praktek pembelajaran berdiferensiasi di lapangan sangat kurang. Guru kesulitan mengkonversikan pembelajaran berdiferensiasi yang dicontohkan pada suatu mata pelajaran, ke mata pelajaran yang dia ampu, karena karakteristik pembelajaran tiap mata pelajaran tidaklah sama. Alih-alih menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yang ada hanyalah keluhan dan kritikan dari guru mengenai susah dan tidak masuk akal nya melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Indonesia yang jumlah siswa dalam satu kelasnya cukup besar.

Beberapa responden menyebutkan alasan mereka lebih memilih pelatihan luring adalah karena merasa sudah jenuh dengan penggunaan laptop ataupun gadget dalam masa pandemi. Penggunaan laptop dan gadget yang rutin semasa pandemi telah mengakibatkan gangguan kesehatan seperti kerusakan pada mata dan sakit kepala. Untuk itu sebisa mungkin mereka akan mengurangi kontak dengan dengan kedua perangkat andalan ini.

Dari pengamatan di lapangan beberapa, beberapa berprinsip bahwa selama belum diwajibkan oleh atasan, dan tidak berpengaruh terhadap penilaian maupun tunjangan, maka sesuatu belum *urgent* untuk dikerjakan, sehingga beberapa guru yang mengajar di kelas X di sekolah dengan jalur IKM Mandiri Berubah, belum pernah sama sekali mengikuti pelatihan tentang Kurikulum Merdeka baik di PMM maupun secara luring. Dan inilah seperti yang disebutkan oleh Wilcox dan kawan-kawan (2017) dengan "*the more things change, the more they remain the same*" dengan kata lain semakin banyak perubahan, semakin banyak hal yang tidak berubah.

Kebijakan pemerintah memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan untuk memilih kurikulum sesuai kesiapannya sudah merupakan kebijakan yang tepat, strategi tersebut diambil pemerintah dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang memberikan dampak yang beragam bagi satuan pendidikan. Ada satuan pendidikan yang menyerah dengan pandemi COVID-19 dan tidak melakukan apa-apa, namun ada juga satuan pendidikan yang melakukan inovasi-inovasi pembelajaran sehingga tetap *survive* di masa pandemi COVID-19. Satuan pendidikan yang *survive* selama pandemi COVID-19 tentu lebih siap dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, dan ada juga satuan pendidikan yang mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan kurikulum baru, bahkan cenderung

1 akan terbebani dengan adanya kebijakan baru. Menambahkan kompleksitas baru pada kondisi yang sudah sulit mungkin bukan merupakan keputusan yang logis (Anggraena et al., 2021).

Platform Merdeka Mengajar (PMM) adalah terobosan yang sangat bagus di dunia pendidikan Indonesia, namun terlalu dini jika pemerintah hanya mengandalkan PMM ini untuk memberikan pengetahuan tentang Kurikulum Merdeka bagi satuan pendidikan yang memilih jalur Mandiri Berubah. Diklat-diklat dan workshop mengenai IKM secara luring masih sangat dibutuhkan. Karena setelah memaknai kurikulum baru, guru masih harus mengkonfirmasi pemahamannya tersebut kepada para ahli kurikulum, agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam menerapkan kurikulum baru tersebut. Selain mengkonfirmasi pemahaman, guru juga perlu melakukan *peer teaching* Kurikulum Merdeka dengan guru selingkung, sebelum mempraktekannya di kelas nyata.

Berkaca juga dari hasil penemuan Bjork (2005), bahwa pola pikir pendidik di Indonesia sangat diwarnai oleh sejarah panjang sistem pendidikan Indonesia, dimana sistem sentralisasi sangat menekankan pentingnya kepatuhan kepada arahan pemerintah pusat. Guru lebih siap untuk mentransmisi (menghantarkan, meneruskan) ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kebangsaan kepada peserta didik, dibandingkan dengan mentransform (mengubah) sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Maka sebelum mensosialisasikan kurikulum baru, pemerintah hendaknya mensosialisasikan terlebih dahulu kepada guru tentang adanya *teacher agency* dalam pendidikan, bahwa guru mempunyai kendali terhadap kurikulum yang akan diterapkan di satuan pendidikan masing-masing.

Dengan menganalogikan bahwa selama ini guru mengelola kelas seperti layaknya seseorang yang tinggal di rumah kontrakan atau kost-kostan, ia akan menjaga rumah itu dengan sewajarnya saja, membersihkan seperlunya bahkan terkadang mengabaikannya. Tetapi guru yang sudah memahami adanya *teacher agency* diumpamakan seperti seseorang yang tinggal di rumah miliknya sendiri, ia akan berusaha agar rumahnya indah dan nyaman untuk ditempati, bahkan akan memperbaiki jika ada yang dirasa kurang. Dengan memahami *teacher agency* guru akan berusaha semaksimal mungkin mengupgrade pengetahuannya agar nanti dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas nyata, ia bisa memberikan yang terbaik dan bisa memenuhi capaian pembelajaran.

Merujuk kembali Spillane dan kawan-kawan, (2002), bahwa proses pemaknaan kebijakan dipengaruhi oleh lingkungan pendidik sebagai ujung tombak pelaksana kebijakan. Ketika pendidik dibairkan dengan paradigma lamanya, namun dipaksakan mengikuti kebijakan baru, maka akibat yang sering muncul adalah adanya implementasi kurikulum yang dangkal, dimana pendidik menerapkan kurikulum yang baru, namun masih menggunakan paradigma lama. Kata kunci di sini adalah menyiapkan pendidik. Tidak akan ada perubahan kurikulum yang terjadi, jika pendidik tidak siap, karena kunci perubahan adalah pendidik itu sendiri.

SIMPULAN

Sebagai upaya dari pemulihan pembelajaran di Indonesia, pemerintah telah mengembangkan Kurikulum Merdeka yang dinilai lebih fleksibel, fokus kepada materi esensial, serta diharapkan mampu mengembangkan karakter dan kompetensi peserta didik. Dalam menerapkan Kurikulum Merdeka satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk memilih jalur mandiri yang akan diterapkan di satuan pendidikan, ada tiga pilihan jalur mandiri, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah dan mandiri berbagi.

Pada penelitian ini penulis mengamati beberapa SMA di Kabupaten Siak yang memilih jalur Mandiri Berubah. Hal yang menjadi sorotan bagi pendidik di sekolah tersebut adalah sosialisasi Kurikulum Merdeka yang dilakukan secara daring melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM). Penggunaan PMM masih belum maksimal karena ada beberapa kendala yang terjadi di lapangan. Kendala tersebut antara lain: pendidik kesulitan mengalokasikan waktu mengikuti pelatihan mandiri di luar jam sekolah, pembelajaran di PMM bersifat teoritis dan sangat umum sehingga pendidik kesulitan mengaplikasikannya dalam pembelajaran, sudah jenuh dengan penggunaan laptop dan HP dalam pembelajaran. Untuk itu pendidik berharap agar dalam sosialisasi kurikulum pelatihan atau sosialisasi dapat dilakukan secara tatap muka (luring).

Penelitian Bjork tentang karakteristik masyarakat Indonesia yang cenderung mengikuti alur dan memegang prinsip kepatuhan, menjadikan tantangan dalam implementasi kurikulum. Pemerintah hendaknya menyadarkan dulu guru-guru di Indonesia dengan adanya kuasa/ kendali pada guru dalam menerapkan kurikulum di kelasnya (*teacher agency*) sehingga guru akan aktif mengembangkan dirinya untuk memberikan yang terbaik di kelas nyatanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G. A., & Verba, S. (1989). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. SAGE Publications, Inc.
- Anggraena, Y., Felicia, N., G, D. E., Pratiwi, I., Utama, B., Alhapip, L., & Widiawati, D. (2021). Kajian Akademik Kurikulum Untuk Pemulihan Pembelajaran. *Pusat Kurikulum Dan Pembelajaran Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi*, 123. [https://repositori.kemdikbud.go.id/20029/1/Buku Merdeka Belajar 2020.pdf](https://repositori.kemdikbud.go.id/20029/1/Buku_Merdeka_Belajar_2020.pdf)
- Ball, S. J. (2005). *Education Policy and Social Class* (1st ed.). Routledge.
- Ball, S., Maguire, M., & Braun, A. (2012). *How School Do Policy: policy Enacments in Secondary Schools*. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780203153185>
- Benavot, A., & Resh, N. (2003). Educational governance, school autonomy, and curriculum implementation: A comparative study of Arab and Jewish schools in Israel. *Journal of Curriculum Studies*, 35(2), 171–196. <https://doi.org/10.1080/0022027022000022856>

- Bjork, C. (2005). *Indonesian Education Teachers, Schools, and Central Bureaucracy*. Taylor & Francis eBooks.
- Bjork, C. (2016). *High-stakes Schooling : What We Can Learn from Japan's Experiences with Testing, Accountability, and Education Reform*. The University of Chicago Press.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development*. Harvard University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=8cf0FYm0jW0C&lpg=PP1&pg=PR4#v=onepage&q&f=false>
- Bryk, A. S., Gomez, L. M., Grunow, A., & LeMahieu, P. G. (2015). *Learning to Improve: How America's Schools Can Get Better at Getting Better*. Harvard Education Press.
[https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=CKZhDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT6&dq=learning+to+improve+how+%22america+s%22+schools+can+get+better+at&ots=XyKBxaYGTL&sig=mdRh-gw24ZK9-9RPsIsgGhZklQS0&redir_esc=y#v=onepage&q=learning to improve how %22america s%22 schools can get better at&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=CKZhDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT6&dq=learning+to+improve+how+%22america+s%22+schools+can+get+better+at&ots=XyKBxaYGTL&sig=mdRh-gw24ZK9-9RPsIsgGhZklQS0&redir_esc=y#v=onepage&q=learning%20to%20improve%20how%20america%20schools%20can%20get%20better%20at&f=false)
- Keputusan Kepala BSKAP tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka Melalui Jalur Mandiri pada Tahun Ajaran 2022/2023 Tahap II, Pub. L. No. NOMOR 027/H/KR/2022 (2022).
- Cheung, A. C. K., & Wong, P. M. (2016). Factors affecting the implementation of curriculum reform in Hong Kong Key findings from a large-scale survey study Alan. *International Journal of Educational Management*, 26(1), 39–54.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/09513541211194374> Downloaded
- Creswell, J. W., Hanson, W. E., Clark Plano, V. L., & Morales, A. (2007). Qualitative Research Designs: Selection and Implementation. *The Counseling Psychologist*, 35(2), 236–264. <https://doi.org/10.1177/0011000006287390>
- Kemdikbudristek. (2021). Panduan Pengembangan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA). *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*, 1–180.
<http://ditpsd.kemdikbud.go.id/hal/profil-pelajar-pancasila>
- Kemdikbudristek. (2022a). *6 Strategi IKM*.
https://docs.google.com/presentation/d/1zxtQvkc4tegQY2SZ65i1K7wjiviG_Dn8/edit#slide=id.p38
- Kemdikbudristek. (2022b). *Implementasi Kurikulum Merdeka*.
<https://kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id/>
- Kneen, J., Breeze, T., Thayer, E., John, V., & Davies-Barnes, S. (2021). Pioneer teachers: How far can individual teachers achieve agency within curriculum development? *Journal of Educational Change*, 0123456789.
<https://doi.org/10.1007/s10833-021-09441-3>
- Lipsky, M. (1980). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public*

- Services. *Russell Sage Foundation*, 10(1), 2015.
- OECD. (2019). OECD Future of Education and Skills 2030: Curriculum analysis. *9th Informal Working Group (IWG) Meeting*, 1–32.
<http://www.oecd.org/education/2030/Preparing-humanity-for-change-and-artificial-intelligence.pdf>
- Print, M. (2020). *Curriculum Development and Design* (2nd ed.). Routledge.
- Rusman. (2019). *Manajemen Kurikulum* (2nd ed.). PT. Rajagrafindo Persada.
- Spillane, J. P. (2005). *Standards deviation: How schools misunderstand education policy*.
https://www.researchgate.net/publication/37713653_Standards_Deviation_How_Schools_Misunderstand_Education_Policy
- Spillane, J. P., Reiser, B. J., & Reimer, T. (2002). Policy implementation and cognition: Reframing and refocusing implementation research. *Review of Educational Research*, 72(3), 387–431. <https://doi.org/10.3102/00346543072003387>
- Steiner-Khamsi, G. gs columbia edu. (2014). Comparison and Context: The Interdisciplinary Approach to the Comparative Study of Education. *Current Issues in Comparative Education*, 16(2), 34–42.
<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eue&AN=98971736&site=ehost-live>
- Tikkanen, L., Pyhältö, K., Soini, T., & Pietarinen, J. (2017). Primary determinants of a large-scale curriculum reform: National board administrators' perspectives. *Journal of Educational Administration*, 55(6), 702–716. <https://doi.org/10.1108/JEA-10-2016-0119>
- Viennet, R., & Pont, B. (2017). Education Policy Implementation: A Literature Review and Proposed Framework. OECD Education Working Papers, No. 162. *OECD Education Working Papers*, 162(December), 63. www.oecd.org/edu/workingpapers
- Wilcox, K. C., Lawson, H. A., & Angelis, J. I. (2017). *Innovation in Odds-Beating Schools: Exemplars for Getting Better at Getting Better*. books.google.com.

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	kurikulum.kemdikbud.go.id Internet Source	10%
2	dindikbud.demakkab.go.id Internet Source	1%
3	disdik.lamongankab.go.id Internet Source	1%
4	jbasic.org Internet Source	<1%
5	wartaguru.id Internet Source	<1%
6	123dok.com Internet Source	<1%
7	SONNY ROHIMAT, Sanusi Sanusi, Munthahanah Munthahanah. "DISEMINASI PLATFORM MERDEKA MENGAJAR UNTUK GURU SMA NEGERI 6 KOTA SERANG", ABDIKARYA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 2022 Publication	<1%

8	repository.widyatama.ac.id Internet Source	<1 %
9	www.liputan6.com Internet Source	<1 %
10	zh.scribd.com Internet Source	<1 %
11	pdfs.semanticscholar.org Internet Source	<1 %
12	timuran151.wordpress.com Internet Source	<1 %
13	dokument.pub Internet Source	<1 %
14	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
15	kabar24.bisnis.com Internet Source	<1 %
16	kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
17	muhammadalmustofa.wordpress.com Internet Source	<1 %
18	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
19	sofaunik.com Internet Source	<1 %

20 www.scribd.com <1 %
Internet Source

21 zacyoc.wordpress.com <1 %
Internet Source

22 "Second Handbook of Information Technology
in Primary and Secondary Education",
Springer Science and Business Media LLC,
2018 <1 %
Publication

23 Heni Jusuf, Ahmad Sobari. "Pembelajaran
Paradigma Baru Kurikulum Merdeka Pada
Sekolah Dasar", Jurnal Pengabdian kepada
Masyarakat UBJ, 2022 <1 %
Publication

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On